

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu tugas utama kelurahan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga. Dalam pelaksanaannya, tugas ini mencakup berbagai aspek seperti penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas ini masih menjadi tantangan di beberapa daerah, termasuk di Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pekan Kuala bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengelola potensi yang ada, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Program-program pemberdayaan seharusnya berorientasi pada penguatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 67 Tahun 2020, tugas kelurahan mencakup pelaksanaan kegiatan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta pembinaan lembaga masyarakat. Akan tetapi, observasi di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di kelurahan pekan kuala masih belum berjalan secara optimal. Program yang dilaksanakan lebih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek inovatif yang dapat mempercepat kemandirian masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga.

Banyak program yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga implementasinya kurang efektif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga profesional di bidang pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi program. Akibatnya, inisiatif yang dijalankan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada bidang ekonomi, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pendampingan secara maksimal dari pemerintah kelurahan.

Minimnya akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta dukungan pemasaran menjadi kendala utama bagi pelaku usaha lokal. Padahal, jika pemberdayaan ekonomi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Pentingnya efektivitas tugas kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat menuntut adanya strategi yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal.

Pemerintah kelurahan perlu mengembangkan program yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan program pemberdayaan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kelurahan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tugas Kelurahan Pekan Kuala dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa efektivitas tugas Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 Pasal 21, yang menyatakan bahwa kelurahan hanya melaksanakan kegiatan kelurahan.

Sementara itu, jenis program kerja kelurahan mencakup: (a) pelaksanaan kegiatan kelurahan, (b) pemberdayaan masyarakat, (c) pelayanan masyarakat, (d) penyelenggaraan ketertiban umum, (e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, serta (f) pembinaan lembaga masyarakat. Namun, dalam praktiknya, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial masih kurang inovatif dan bersifat normatif, terutama dalam pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah serta pengembangan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, belum terlihat strategi konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kurangnya inisiatif dalam menciptakan program berbasis kebutuhan masyarakat menyebabkan efektivitas pemberdayaan ekonomi masih rendah, sehingga potensi masyarakat tidak dapat berkembang secara optimal.

Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan dua cara, yaitu menggunakan indikator objektif yang diukur melalui pendapatan serta indikator subjektif yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan, keharmonisan keluarga, kondisi rumah, dan keamanan. Indikator-indikator tersebut memperluas skala pengukuran tingkat kesejahteraan.¹

Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan hakikat serta martabat manusia. Kesejahteraan sosial juga mencakup kemampuan individu dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, maupun masyarakat, sehingga mereka dapat berkembang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial. Peningkatan kualitas SDM ini bertujuan agar masyarakat dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan secara mandiri, produktif, serta sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

¹Zainollah wahyudi, F. (2018) Analisis Efektivitas Kebijakan Program RASTA Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal penelitian ipteks*, 3(2), 163-175.

Selain itu, kesejahteraan sosial juga erat kaitannya dengan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu secara optimal. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang efektif, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan taraf hidupnya dan berkontribusi dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya, tujuan politiknya dan memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.²

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang dapat mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Jika kondisi tersebut diabaikan, maka berpotensi memicu konflik horizontal yang dapat berujung pada disintegrasi sosial yang merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam membangun kesejahteraan sosial, seperti penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penciptaan peluang ekonomi yang merata. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal ini meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, dan irigasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

²Zulkarimen Nasution, 2007, komunikasi pembangunan pengenalan teori dan penerapannya Edisi Revisi 6. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan, seperti peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan serta kesehatan. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah dan komunitas dapat berkontribusi melalui program sosial, advokasi keadilan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif dari setiap individu juga sangat penting, baik dalam bentuk keterlibatan dalam inisiatif komunitas maupun kepedulian terhadap sesama. Dengan kerja sama yang sinergis, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, memberdayakan setiap anggota masyarakat, serta memastikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi semua.

Dari uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian “Efektivitas Tugas Kelurahan Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Tugas Kelurahan Di bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat”

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi penelitiannya tentang efektivitas tugas kelurahan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah, melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan seksi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentu mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan peneliti ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana efektivitas tugas kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan tentang efektivitas tugas kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat.

2. Secara praktis

a) Untuk Pemerintahan

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

b) Untuk Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan edukasi terkait penurunan stunting yang ada pada Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

c) Untuk Peneliti

Manfaat yang didapatkan peneliti ini yaitu pengetahuan dan pengalaman baru terkait kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan Masyarakat

Manfaat selanjutnya yang akan didapatkan peneliti yaitu penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di lingkup FISIP UISU

d) Untuk FISIP UISU

Bagi FISIP UISU penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan reputasi Fakultas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

Teori Penelitian merupakan uraian sistematis mengenai teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap serta mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Teori penelitian ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa, menjelaskan serta memperoleh kesimpulan dalam penelitian.

Penelitian atau riset dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh solusi masalah yang tepat. Apabila studi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah (*scientific research*). Dengan demikian, penelitian dapat diartikan sebagai jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam dengan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan persoalan dan menemukan sesuatu yang baru.³

Terdapat dua teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, teori Efektivitas kebijakan Campbell J.P terdapat lima variabel yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, keputusan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan kedua teori pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada.

Campbell J.P. dalam Richard M. (2005) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi atau lembaga publik dapat dinilai melalui lima indikator utama, yakni keberhasilan suatu program, ketepatan suatu program, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta tercapainya tujuan secara menyeluruh. Kelima indikator ini menjadi acuan dalam mengevaluasi sejauh mana tugas kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat telah terlaksana dengan baik.⁴

³ Sahya Anggara. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

⁴ Campbell, J.P 1989, Teori Efektivitas, dalam Richard M: Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*, yang berarti sesuatu yang menghasilkan hasil yang baik. Istilah efektivitas mengandung pengertian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu aktivitas, kebijakan, atau program dapat mencapai hasil yang diinginkan secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan upaya melakukan perbandingan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah terwujud, jika hasil yang diperoleh tidak tepat dengan rencana awal yang menyebabkan tujuan tidak tercapai maka dapat dikatakan kegiatan tersebut tidak efektif.⁵

Unsur penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan secara maksimal sesuai dengan apa yang telah disepakati. Tujuan sendiri merupakan harapan terhadap suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai melalui serangkaian proses. Dengan demikian, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun waktu pencapaiannya. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau individu dalam menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, efektivitas berkaitan erat dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi atau individu. Tanpa efektivitas, pencapaian target menjadi tidak terarah, dan potensi sumber daya yang ada bisa terbuang sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi proses agar tetap sejalan dengan tujuan awal yang telah ditentukan.

⁵Abizal, N, Maimun, Yuliandawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19(Studi Kasuskecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jimebis*, 1(1),55-70.

Adapun untuk mengukur efektivitas terdapat 5 indikator yang paling menonjol yaitu sebagai berikut:

1. Keberhasilan program : yaitu pengukuran efektivitas dalam artitercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Keberhasilan sasaran : yaitu pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran.
3. Keputusan terhadap program : yaitu kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut.
4. Tingkat input dan output : yaitu dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output).
5. Pencapaian tujuan yang menyeluruh : yaitu bias dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dalam hal ini merupakan penilaian umum efektivitas organisasi.⁶

2.1.2 Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020

Tentang program kerja kelurahan yang ada di peraturan bupati nomor 69 tahun 2020 Pasal 21 adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga Masyarakat

Poin-poin di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan kelurahan

Pelaksanaan kegiatan kelurahan merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, seperti administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga pemeliharaan

⁶Multiarin, Dyah dan Arif Zainuddin. 2019. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. 305, 2014

sarana dan prasarana umum. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang tertata, aman, dan kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam aspek administrasi pemerintahan, kelurahan bertanggung jawab atas pencatatan kependudukan, pengurusan surat-menyurat, serta pendataan berbagai sektor yang ada di masyarakat, seperti data kemiskinan, UMKM, dan pendidikan. Pelayanan administrasi yang cepat dan transparan sangat penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus berbagai keperluan, seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Efisiensi dalam administrasi kelurahan juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat terbawah memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan yang responsif, akurat, dan ramah sangat menentukan kepuasan warga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan. Masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata apabila kelurahan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan profesional dalam setiap aspek pelayanan publik.

Selain itu, pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh kelurahan. Pelayanan ini mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kelurahan sering kali bekerja sama dengan puskesmas, sekolah, serta instansi terkait lainnya dalam menjalankan program-program layanan bagi masyarakat. Contohnya adalah program vaksinasi, bantuan sosial, serta penyuluhan kesehatan dan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kelurahan berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan lingkungan dan peningkatan ekonomi. Kelurahan juga memfasilitasi berbagai pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha mikro, serta kegiatan gotong royong yang memperkuat solidaritas sosial. Melalui forum musyawarah warga atau lembaga kemasyarakatan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan keterlibatan

masyarakat yang tinggi, kelurahan tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga mitra masyarakat dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha bagi UMKM, serta pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, program pemberdayaan ini mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan, memperkuat jaringan ekonomi lokal, serta membuka lapangan kerja baru di tingkat kelurahan. Peran aktif kelurahan dalam memfasilitasi, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilannya. Dengan pendampingan yang tepat, kelompok-kelompok usaha dapat lebih terarah dalam pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga pengembangan inovasi usaha. Pada akhirnya, keberhasilan program pemberdayaan ini turut berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di lingkungan masyarakat.

Pemeliharaan sarana dan prasarana umum juga menjadi bagian dari kegiatan kelurahan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya perlu dikelola dan dirawat agar tetap dalam kondisi baik. Kegiatan ini sering kali melibatkan partisipasi masyarakat melalui program gotong royong atau kerja bakti yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kelurahan dan masyarakat, pemeliharaan fasilitas umum dapat berjalan lebih efektif. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, kegiatan ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial antarwarga. Kelurahan memiliki peran penting dalam merencanakan, mengarahkan, dan memantau kegiatan pemeliharaan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat merasa memiliki peran langsung dalam pembangunan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap fasilitas yang ada. Hal ini tidak hanya memperpanjang usia infrastruktur, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tertib, sehat, dan mendukung aktivitas sosial ekonomi warga.

Selain itu, kelurahan juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, RT/RW, serta tokoh masyarakat, kelurahan dapat mengadakan kegiatan seperti ronda malam, penyuluhan hukum, serta sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kejahatan lainnya. Keamanan lingkungan yang terjaga akan menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tenang. Peran kelurahan dalam hal ini tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan bersama. Dengan membentuk forum kemitraan antara warga dan aparat keamanan, berbagai potensi konflik atau tindak kriminalitas dapat dicegah sejak dini. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan positif seperti karang taruna atau pelatihan bela negara juga dapat memperkuat sistem keamanan berbasis komunitas. Upaya kolaboratif ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga harmonis secara sosial.

Dengan berbagai kegiatan yang dijalankan, kelurahan memiliki peran strategis dalam pembangunan di tingkat lokal. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, serta berbagai pihak terkait agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh warga. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan publik. Partisipasi aktif warga dalam musyawarah dan pengawasan kegiatan turut memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kelurahan.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/ organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau

keinginan orang lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya⁷.

Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya⁸. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada seperti; Pertama, pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal. Kedua, pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. Dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu individu maupun kolektif guna mengembangkan potensi dan kemampuannya yang terdapat dari dalam individu dan kelompok masyarakat, sehingga mampu melakukan transformasi sosial. Kehidupan masyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah, dimana setiap anggotanya melalui aktivitas sehari-hari saling belajar dan mengajar.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi proses interaksi dalam wujud dialog dan komunikasi informasi antara sesama anggota masyarakat yang saling mendorong guna mencapai pemenuhan hidup manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai pada aktualisasi diri. Ketiga, pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya⁹.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun

⁷Anwas, M. Oos. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta

⁸Panarka, A. M. W., & Moelijarto, V. (2017). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS

⁹Ibid.

membuka usaha sendiri. Pelatihan ini juga sering melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta agar program yang diberikan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan transfer pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang lebih luas, serta memperluas jaringan kemitraan yang dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat. Dengan pendekatan ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga wawasan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan akses permodalan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Selain pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Banyak program yang difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha, kredit lunak, serta pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya akses terhadap modal dan pendampingan, masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Pemerintah dan berbagai organisasi juga sering memberikan fasilitas berupa tempat usaha, jaringan pemasaran, serta bantuan teknologi agar UMKM dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya. Masyarakat didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok gotong royong. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga membantu membangun lingkungan yang lebih harmonis dan kondusif. Selain itu, penguatan budaya lokal juga menjadi bagian dari pemberdayaan, dimana masyarakat diberikan ruang untuk melestarikan kearifan lokal dan tradisi mereka. Melalui festival budaya, pelatihan seni tradisional, dan kegiatan edukatif berbasis budaya, masyarakat dapat memperkuat identitas mereka sekaligus menarik potensi pariwisata lokal. Hal ini menciptakan sinergi antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang berbasis partisipasi. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program-program yang dijalankan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki program yang dijalankan dan lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program tersebut. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung, sementara sektor swasta dapat membantu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di sisi lain, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program-program yang ada. Dengan adanya kerja sama yang baik, pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas utama kelurahan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga secara efektif dan efisien. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga bantuan sosial. Tujuan utama pelayanan masyarakat adalah memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya secara adil dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam aspek administrasi kependudukan, kelurahan bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan surat keterangan lainnya. Kelancaran proses administrasi ini sangat penting bagi warga dalam berbagai keperluan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, kelurahan harus menyediakan sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan bebas dari pungutan liar. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan, seperti melalui sistem pelayanan daring (online) yang memungkinkan warga mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Dengan pelayanan yang prima, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal pun akan meningkat.

Selain itu, kelurahan juga berperan dalam memberikan pelayanan perizinan usaha dan pembangunan. Warga yang ingin mendirikan usaha atau membangun rumah memerlukan berbagai izin yang dikeluarkan oleh kelurahan. Dalam hal ini, pelayanan yang cepat dan transparan sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mencegah praktik korupsi dalam pengurusan perizinan. Prosedur yang jelas dan mudah dipahami akan mempermudah warga dalam memenuhi persyaratan administratif tanpa kebingungan. Kelurahan juga dapat menyediakan layanan konsultasi atau pendampingan teknis bagi masyarakat yang ingin mengajukan izin, sehingga prosesnya berjalan lancar dan sesuai aturan. Dengan demikian, iklim investasi lokal dapat berkembang, dan tata ruang wilayah tetap tertata secara baik dan berkelanjutan.

Di bidang sosial, pelayanan masyarakat mencakup bantuan bagi warga kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kelurahan bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga lainnya untuk menyalurkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta berbagai program kesejahteraan sosial lainnya. Pendataan yang akurat dan sistem distribusi yang transparan menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses verifikasi dan pemantauan penyaluran bantuan sangat penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, pelayanan sosial di tingkat kelurahan dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelayanan kesehatan juga menjadi bagian penting dari tugas kelurahan. Kelurahan berperan dalam mendukung program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, posyandu, serta penyuluhan kesehatan. Selain itu, kelurahan juga bekerja sama dengan puskesmas untuk memastikan layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh seluruh warga, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Kegiatan seperti pemeriksaan rutin, pembagian suplemen, dan edukasi tentang pola hidup sehat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif yang dijalankan di tingkat kelurahan. Peran kader kesehatan dan relawan juga sangat vital dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat RT/RW. Dengan sinergi yang baik antara kelurahan,

tenaga medis, dan masyarakat, derajat kesehatan warga dapat terus ditingkatkan secara menyeluruh.

Agar pelayanan masyarakat berjalan optimal, kelurahan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, seperti melalui sistem pelayanan online yang mempermudah warga dalam mengurus administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Dengan pelayanan yang baik, kelurahan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerahnya. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan kelurahan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan secara real-time, sehingga dapat segera melakukan perbaikan jika diperlukan. Keterbukaan informasi dan akses mudah ke layanan akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap warga merasa dihargai dan terlibat dalam setiap aspek pembangunan.

d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayahnya. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan konflik sosial, penegakan peraturan daerah, serta koordinasi dengan aparat keamanan seperti kepolisian dan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas). Selain itu, kelurahan juga berperan dalam penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta mendukung terbentuknya budaya saling menghargai di antara warga. Melalui pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, kelurahan dapat mencegah potensi gangguan keamanan dan menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan nyaman untuk seluruh warganya.

Kelurahan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Misalnya, jika ada indikasi perselisihan antarwarga, kelurahan dapat melakukan mediasi dan mencari

solusi damai agar konflik tidak berkembang menjadi lebih besar. Selain itu, kelurahan juga dapat mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan ketua RT/RW untuk memantau situasi sosial di lingkungan masing-masing. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan potensi masalah menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang persuasif dan preventif, kelurahan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan menghindari eskalasi masalah, sehingga ketenteraman dan ketertiban dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, kelurahan juga dapat mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ketertiban, baik di lingkungan rumah tangga, tempat usaha, maupun ruang publik. Sosialisasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan, untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kelurahan juga dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Satlinmas untuk memberikan edukasi mengenai hukum, peraturan daerah, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi gangguan ketertiban. Melalui pendekatan yang melibatkan semua elemen masyarakat, kelurahan dapat menciptakan budaya sadar hukum dan menjaga stabilitas sosial secara lebih efektif.

Dalam upaya menciptakan ketenteraman, kelurahan juga berperan dalam menertibkan aktivitas yang berpotensi mengganggu masyarakat, seperti penggunaan jalan umum yang tidak sesuai peruntukan, kebisingan yang berlebihan, atau penyalahgunaan fasilitas umum. Selain itu, kelurahan juga dapat bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menangani permasalahan seperti penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas, peredaran minuman keras ilegal, dan tindakan kriminal lainnya. Dengan melakukan pemantauan rutin dan koordinasi yang baik dengan kepolisian serta Satlinmas, kelurahan dapat memastikan agar lingkungan tetap aman dan tertib. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan dan dampak negatif dari aktivitas yang mengganggu ketenteraman juga penting dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif. Pendekatan yang tegas namun humanis dalam menanggapi permasalahan ini dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.

Sebagai bentuk pengamanan lingkungan, kelurahan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban melalui kegiatan seperti Siskamling atau Ronda Malam. Dengan melibatkan warga dalam sistem keamanan lingkungan, potensi kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau tindak kriminal lainnya dapat diminimalkan. Selain itu, kerja sama dengan aparat kepolisian dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan masalah keamanan dapat berjalan lebih efektif. Melalui koordinasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, kelurahan dapat memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat yang lebih responsif dan preventif. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, lingkungan akan lebih terjaga, menciptakan rasa aman bagi seluruh warga.

Penyelenggaraan ketertiban juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan warga terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, seperti aturan lalu lintas, kebersihan lingkungan, serta ketertiban dalam penggunaan fasilitas umum. Kelurahan dapat bekerja sama dengan dinas terkait untuk menegakkan peraturan tersebut, misalnya melalui patroli lingkungan atau tindakan peneguran bagi warga yang melanggar aturan. Selain itu, kelurahan juga dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran. Pendekatan yang dilakukan dengan cara persuasif dan berbasis pada dialog yang konstruktif akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban secara mandiri, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pihak.

Agar penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan optimal, kelurahan harus memiliki sistem koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, aparat keamanan, serta lembaga pemerintahan lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, kelurahan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya. Koordinasi yang baik akan memastikan informasi mengenai potensi gangguan ketertiban dapat disampaikan dengan cepat, serta langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban melalui kegiatan sosial, seperti Siskamling dan gotong royong,

akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekitar. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat memastikan ketenteraman dan ketertiban dapat terwujud dan terjaga dengan baik.

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum merupakan salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh kelurahan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga. Fasilitas umum seperti jalan, drainase, taman, tempat ibadah, serta sarana kesehatan dan pendidikan harus selalu dalam kondisi baik agar dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan.

Salah satu aspek utama dalam pemeliharaan prasarana adalah perbaikan dan perawatan jalan lingkungan. Jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas masyarakat, meningkatkan risiko kecelakaan, serta berdampak pada perekonomian warga. Oleh karena itu, kelurahan perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan secara berkala dan sesuai standar keselamatan.

Selain jalan, drainase dan saluran air juga menjadi fokus penting dalam pemeliharaan infrastruktur. Saluran air yang tersumbat atau tidak terawat dapat menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, serta munculnya berbagai penyakit akibat genangan air kotor. Kelurahan dapat mengadakan kegiatan kerja bakti bersama warga untuk membersihkan saluran air secara rutin guna mencegah terjadinya masalah lingkungan yang lebih besar. Selain itu, kelurahan dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan dampak buruk dari sampah yang dibuang sembarangan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur ini akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi warga.

Kelurahan juga memiliki peran dalam menjaga fasilitas sosial seperti taman, tempat olahraga, serta ruang terbuka hijau. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat. Dengan memastikan kebersihan, keamanan, dan ketersediaan sarana di

tempat-tempat ini, kelurahan dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Kelurahan dapat mengorganisir kegiatan seperti olahraga bersama, acara kebersihan, atau festival lingkungan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam merawat fasilitas tersebut. Selain itu, dengan menjaga keberlanjutan dan perawatan ruang terbuka hijau, kelurahan juga turut berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim, seperti penyerapan karbon dan peningkatan kualitas udara.

Di bidang pelayanan umum, sarana pendidikan dan kesehatan juga memerlukan perhatian khusus. Kelurahan dapat bekerja sama dengan sekolah dan puskesmas untuk memastikan fasilitas yang tersedia dalam kondisi layak dan mendukung proses belajar serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Kelurahan dapat melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi bangunan sekolah dan puskesmas, serta memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang kelas, alat peraga, obat-obatan, dan peralatan medis lainnya. Selain itu, kelurahan dapat mengorganisir program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pelatihan atau seminar bagi tenaga pendidik dan tenaga medis, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan menjaga kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan, kelurahan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan sehat.

Bantuan dalam bentuk renovasi bangunan, penyediaan fasilitas tambahan, hingga pengawasan kebersihan lingkungan sekolah dan puskesmas menjadi bagian dari tanggung jawab kelurahan dalam mendukung pelayanan publik. Kelurahan dapat berperan dalam merencanakan dan mengoordinasikan perbaikan fasilitas fisik yang diperlukan, seperti perbaikan atap yang bocor, pengecatan ulang ruang kelas, atau penambahan fasilitas sanitasi di puskesmas. Selain itu, kelurahan juga dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, seperti gotong royong untuk menjaga lingkungan sekolah dan puskesmas tetap bersih dan nyaman. Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan, kelurahan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga.

Agar pemeliharaan fasilitas umum berjalan efektif, diperlukan sistem pengawasan dan pelaporan yang baik. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut

serta dalam mengawasi kondisi infrastruktur di sekitar mereka dan melaporkan jika ada kerusakan atau masalah yang perlu segera ditangani. Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah kelurahan dan warga, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

f. Pembinaan lembaga masyarakat

Lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat kelurahan. Pembinaan lembaga masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi kemasyarakatan agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai program pembangunan. Kelurahan sebagai bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam memberikan arahan, pendampingan, serta fasilitasi bagi lembaga masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi masyarakat. Pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan manajemen organisasi, kepemimpinan, administrasi, serta perencanaan program sangat diperlukan agar pengurus lembaga dapat bekerja secara lebih profesional. Dengan adanya peningkatan kapasitas, lembaga masyarakat dapat lebih mandiri dan inovatif dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, kelurahan juga berperan dalam memperkuat koordinasi antar lembaga masyarakat, seperti Karang Taruna, PKK, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan kelompok usaha bersama. Sinergi yang baik antar lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Kelurahan dapat memfasilitasi pertemuan rutin antar lembaga tersebut untuk merencanakan dan mengevaluasi program-program yang ada, serta memastikan setiap lembaga berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan tujuan bersama. Dengan koordinasi yang solid, program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, atau pengembangan budaya lokal dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Pemerintah kelurahan dapat memfasilitasi pertemuan rutin untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antar lembaga masyarakat. Dukungan

dalam bentuk sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh kelurahan. Penyediaan fasilitas pertemuan, peralatan kerja, hingga akses terhadap pendanaan dapat membantu lembaga masyarakat dalam menjalankan programnya dengan lebih efektif. Pemerintah juga dapat membantu dalam menghubungkan lembaga masyarakat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam pengembangan program.

Penguatan peran lembaga masyarakat juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan warga, berbagai program yang dijalankan oleh lembaga masyarakat dapat lebih sukses dan berkelanjutan. Kelurahan dapat berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara lembaga masyarakat dan warga setempat.

Untuk memastikan efektivitas pembinaan, diperlukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja lembaga masyarakat. Kelurahan dapat melakukan penilaian terhadap program yang telah dijalankan, mengevaluasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pembinaan lembaga masyarakat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.

2.1.3 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

1. Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sesuai regulasi yang berlaku.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas utama kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Implementasi kebijakan pemberdayaan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku agar program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat, seperti peraturan pemerintah daerah dan undang-undang terkait, menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan mengikuti regulasi yang berlaku, kelurahan dapat memastikan bahwa

setiap program memiliki dasar hukum yang jelas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan yang matang diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Selain itu, penyusunan program harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta perwakilan dari kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung. Pemerintah kelurahan perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya sangat penting agar program dapat berjalan dengan efektif serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan, tantangan sering kali muncul, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya pemahaman warga tentang manfaat program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu melakukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami pentingnya program pemberdayaan serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam program akan meningkatkan rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Evaluasi dan pengawasan menjadi tahap yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kelurahan harus melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi, program yang kurang efektif dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pemberdayaan yang lebih baik di masa mendatang.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, program pemberdayaan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tugas utama kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Implementasi kebijakan pemberdayaan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku agar program yang dijalankan dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang optimal. Regulasi yang mengatur pemberdayaan masyarakat, seperti peraturan pemerintah daerah dan undang-undang terkait, menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan mengikuti regulasi yang berlaku, kelurahan dapat memastikan bahwa setiap program memiliki dasar hukum yang jelas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan yang matang diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Pada tahap perencanaan, kelurahan perlu melakukan survei dan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa program yang dirancang relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan lancar dan tepat sasaran. Setelah program dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya terhadap masyarakat, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk keberhasilan program di masa mendatang. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada umpan balik, pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan program harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta

perwakilan dari kelompok sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, kelurahan dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, serta menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara warga. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan juga akan meningkatkan keberhasilan implementasi program, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas pendukung. Pemerintah kelurahan perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya sangat penting agar program dapat berjalan dengan efektif serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan, tantangan sering kali muncul, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya pemahaman warga tentang manfaat program yang dijalankan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu melakukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami pentingnya program pemberdayaan serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam program akan meningkatkan rasa memiliki dan memastikan keberlanjutan program yang telah dijalankan.

Evaluasi dan pengawasan menjadi tahap yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kelurahan harus melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan adanya evaluasi, program yang kurang efektif dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pemberdayaan yang lebih baik di masa mendatang.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, program pemberdayaan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.

3. Keberlanjutan dan dampak positif dari program yang dijalankan.

Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi warga. Program yang hanya berjalan dalam jangka pendek tanpa strategi keberlanjutan berisiko kehilangan dampak positifnya setelah bantuan atau intervensi dari pemerintah dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk menjaga agar program tetap berjalan secara mandiri, bahkan setelah dukungan eksternal berkurang.

Salah satu faktor utama dalam menjaga keberlanjutan adalah penguatan kapasitas masyarakat. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dapat melanjutkan program pemberdayaan secara mandiri. Misalnya, dalam program pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, keberlanjutan dapat dijaga dengan membentuk komunitas wirausaha yang saling mendukung dalam pengembangan usaha. Selain itu, adanya akses terhadap pendanaan, baik melalui koperasi, bank, atau modal usaha mandiri, juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan usaha yang telah dirintis.

Keberlanjutan program juga dapat didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan perlu memastikan adanya regulasi dan dukungan administratif yang membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sosial mereka. Misalnya, dalam program pembangunan ekonomi berbasis komunitas, pemerintah dapat memberikan kemudahan perizinan usaha, fasilitasi pasar, serta akses terhadap pelatihan lanjutan yang membantu masyarakat meningkatkan daya saing mereka.

Selain keberlanjutan, dampak positif dari program pemberdayaan juga menjadi ukuran keberhasilan. Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatnya kualitas hidup, serta terbentuknya komunitas yang lebih mandiri dan berdaya. Program yang berhasil akan menciptakan efek berantai, di mana masyarakat yang telah diberdayakan dapat menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya, dalam program pelatihan keterampilan, peserta yang sukses dapat berbagi ilmu dengan warga lain, sehingga manfaat program dapat meluas ke lebih banyak orang.

Selain dampak ekonomi, program pemberdayaan juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan, solidaritas sosial dan kebersamaan dalam komunitas semakin kuat. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan lain yang mendukung kehidupan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Secara keseluruhan, keberlanjutan dan dampak positif dari program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan berbagai pihak. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang mendukung, dan partisipasi yang tinggi, program pemberdayaan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih mandiri dan berdaya.

2.1.4 Kualitas Pelayanan Kelurahan

Menurut Kasmir, mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.¹⁰

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat. Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas bagaimana program dirancang, dikelola, dan diimplementasikan.

¹⁰ Kasmir, *Etika Costumer Service* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Begitu pula tanpa akuntabilitas, sulit untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya. Oleh karena itu, kedua aspek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dalam menjalankan program pemberdayaan.

Salah satu bentuk transparansi dalam penyelenggaraan program adalah keterbukaan informasi mengenai anggaran, sasaran program, serta tahapan implementasi. Pemerintah kelurahan perlu menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana program digunakan dan siapa saja yang berhak menerima manfaatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumuman resmi, publikasi laporan keuangan, atau forum musyawarah yang melibatkan warga. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan program sehingga mengurangi potensi penyimpangan.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi aspek yang tak kalah penting dalam memastikan efektivitas program. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terhadap pelaksanaan program serta hasil yang dicapai. Setiap tahapan program harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas, baik kepada pihak yang lebih tinggi dalam pemerintahan maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Laporan berkala yang disusun secara sistematis dapat menjadi alat evaluasi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana.

Penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan. Pembentukan kelompok masyarakat yang bertugas sebagai pengawas independen dapat membantu memastikan bahwa program dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan regulasi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana atau ketimpangan dalam distribusi manfaat dapat diminimalkan.

Selain itu, pemerintah kelurahan juga perlu memiliki sistem penanganan keluhan yang efektif. Jika ada warga yang merasa tidak mendapatkan haknya atau menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, mereka harus memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Sistem ini harus berjalan secara responsif dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program, efektivitas pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Masyarakat akan lebih percaya dan antusias dalam berpartisipasi jika mereka melihat bahwa program dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tujuan utama dari program pemberdayaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

2. Responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Responsivitas dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah kelurahan harus mampu mendengarkan, memahami, dan menanggapi kebutuhan warga secara cepat dan tepat agar program yang dilaksanakan memiliki dampak nyata dan berkelanjutan.

Salah satu langkah untuk meningkatkan responsivitas adalah melalui mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Musyawarah atau forum diskusi terbuka dapat menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti media sosial atau aplikasi layanan publik dapat digunakan untuk menampung keluhan, saran, serta masukan dari masyarakat secara lebih cepat dan efisien.

Program pemberdayaan masyarakat yang responsif juga harus didasarkan pada data dan riset yang akurat. Pemerintah kelurahan perlu melakukan survei, wawancara, atau kajian sosial untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. Dengan data yang valid, program dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan solusi yang relevan bagi warga. Selain itu, data yang akurat juga dapat membantu dalam mengukur dampak program, menentukan prioritas kebutuhan, serta memonitor perkembangan yang terjadi selama implementasi. Dengan pendekatan berbasis data, kelurahan dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mengatasi isu-isu yang ada secara efektif.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan responsivitas.

Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan, mereka akan lebih antusias dalam berpartisipasi serta mendukung keberhasilan program. Ini juga mencegah terjadinya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah kelurahan juga harus memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan program dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Jika ditemukan bahwa suatu kebijakan kurang efektif atau tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka harus ada mekanisme revisi dan adaptasi agar program tetap berjalan dengan optimal. Responsivitas yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk segera menyesuaikan strategi dalam mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan program.

Dengan menerapkan prinsip responsivitas yang baik, program pemberdayaan masyarakat dapat lebih tepat guna dan memberikan manfaat yang lebih besar. Masyarakat akan merasa dihargai dan didukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat.

3. Efisiensi dalam pelaksanaan tugas kelurahan terkait pemberdayaan

Efisiensi dalam pelaksanaan tugas kelurahan terkait pemberdayaan masyarakat merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah kelurahan harus mampu mengelola anggaran, tenaga kerja, serta waktu dengan baik agar program pemberdayaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu aspek utama dalam meningkatkan efisiensi adalah perencanaan yang matang. Kelurahan perlu menyusun program kerja yang jelas, terstruktur, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan ini mencakup alokasi sumber daya secara tepat, pemetaan potensi dan permasalahan, serta penetapan indikator keberhasilan yang jelas agar program dapat berjalan sesuai target yang diharapkan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam administrasi dan pelaksanaan program pemberdayaan juga dapat meningkatkan efisiensi. Digitalisasi dalam pengelolaan data, pendistribusian bantuan, serta pelaporan program dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga kelurahan dapat lebih fokus pada implementasi program secara langsung di lapangan. Dengan sistem berbasis teknologi, kelurahan dapat memantau perkembangan program secara real-time, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalisir kesalahan administratif. Teknologi juga mempermudah komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Dengan demikian, penggunaan teknologi dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat, menjadikan program lebih transparan, akuntabel, dan lebih mudah diakses oleh seluruh pihak terkait.

Efisiensi juga dapat dicapai melalui koordinasi yang baik antara kelurahan dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat itu sendiri. Dengan adanya sinergi dan pembagian peran yang jelas, pelaksanaan program pemberdayaan dapat berjalan lebih lancar tanpa adanya tumpang tindih tugas atau pemborosan sumber daya.

Monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi. Dengan melakukan evaluasi, kelurahan dapat mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kemudian melakukan perbaikan agar pelaksanaan di tahap berikutnya menjadi lebih efektif dan efisien. Evaluasi ini juga membantu dalam memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar tersalurkan kepada sasaran yang tepat.

Partisipasi aktif masyarakat juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pemberdayaan, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai pelaksana, maka beban pemerintah kelurahan dapat berkurang. Dengan demikian, program dapat berjalan lebih cepat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mempercepat pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program tersebut. Masyarakat yang berpartisipasi aktif cenderung memiliki komitmen lebih

tinggi untuk menjaga keberlanjutan program, memastikan pengelolaan yang baik, serta membantu dalam penyebaran informasi ke sesama warga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, program pemberdayaan akan lebih mudah dicapai dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama.

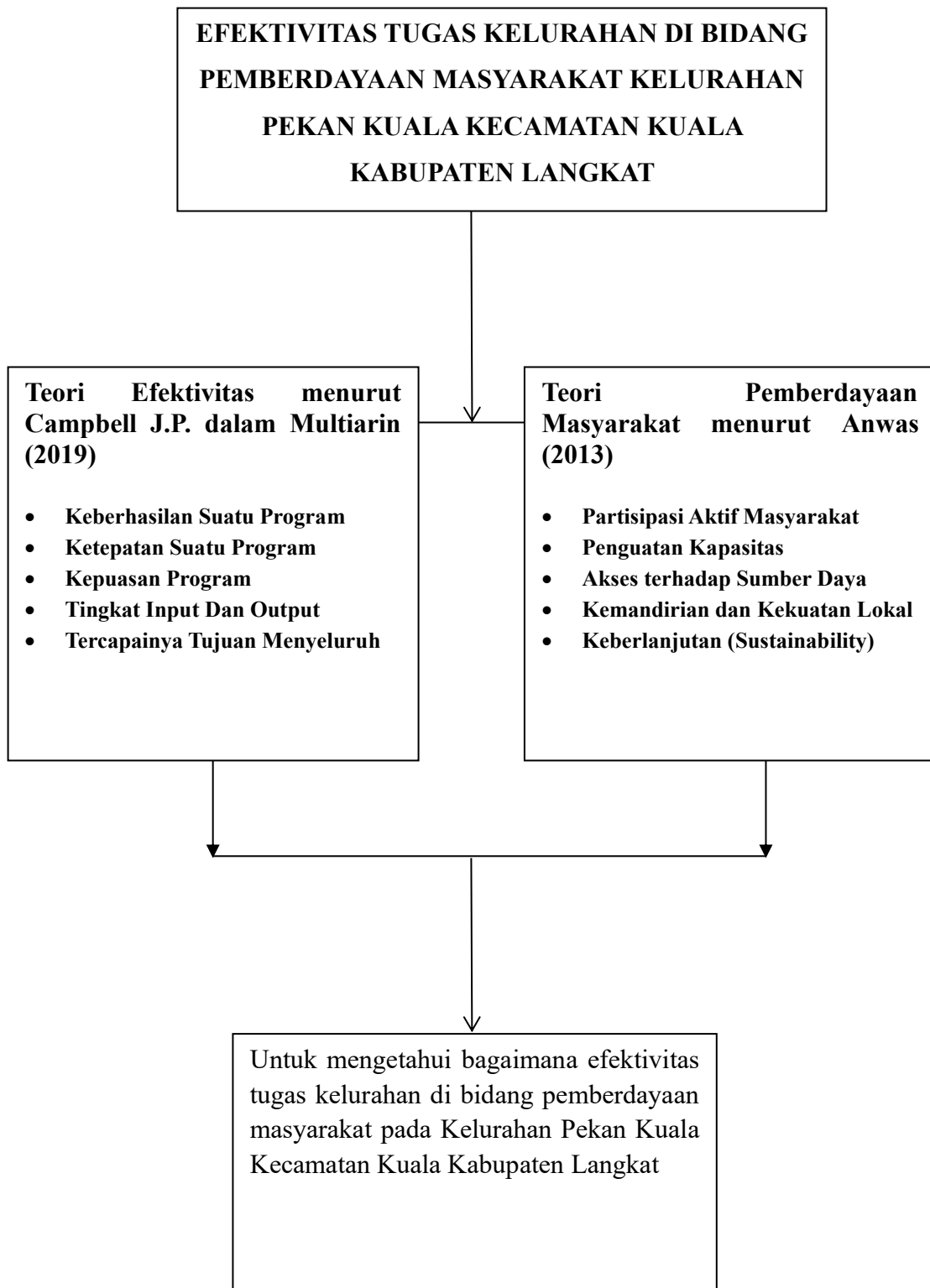
2.2 Penelitian Terdahulu

No	PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	“Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karyawan”, Rosi Rahayu, Kusrin Kusrin, Hanny Purnamasari (2023)	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajian mengenai efektivitas program kelurahan serta penggunaan metode penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 1. Lokus penelitian – Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Cibuaya, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berlokasi di Kelurahan Pekan Kuala. 2. Fokus program – Penelitian terdahulu meneliti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
2	“Efektivitas Pemberdayaan Pelaku UMKM dalam Upaya Program Desa Berdaya pada Taman Kuliner Paciran dan Pusat Oleh-Oleh (Studi Pelaku UMKM Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)”. Inung Cintiyah Putri Fella, Eny Haryati (2023)	Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada fokus kajian mengenai efektivitas program kelurahan serta penggunaan metodologi penelitian yang sama, yaitu metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada locus dan fokus kajian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Paciran dengan fokus pada Program Desa Berdaya di Taman Kuliner Paciran dan Pusat Oleh-Oleh, sementara penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pekan Kuala dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.
3	“Efektivitas Program Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak DiKota Palembang “Annisa Putri Ramadanti, Dwi Mirani (2023)	Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan sekarang yaitu mengenai efektivitas program	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada locus, fokus program, dan keterbaruan data. Penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan

		kelurahan. penggunaan metodologi penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.	Tampuni, sedangkan penelitian ini di Kelurahan Pekan Kuala. Jika sebelumnya berfokus pada Kampung Keluarga Berencana, penelitian ini menitikberatkan pada pembangunan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini menggunakan data terbaru tahun 2024, sementara penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2020.
4	“Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara” Ainaa Maulidya Zahra, Novie Indrawati Sagita (2023)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada efektivitas program kelurahan dan penggunaan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada locus dan fokus kajian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, sementara penelitian ini di Kelurahan Pekan Kuala. Jika sebelumnya berfokus pada efektivitas Program Jakarta Entrepreneur dalam pemberdayaan UMKM, penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.
5	“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Malang”. Rizqi iman dasari (2022)	Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan sekarang yaitu mengenai efektivitas program kelurahan. penggunaan metodologi penelitian yang sama yaitu metode kualitatif.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian efektivitas program kelurahan dan penggunaan metode kualitatif.

2.3 Kerangka Berpikir

Efektivitas program kerja kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial dapat diukur dari sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program yang efektif harus dirancang berdasarkan kebutuhan warga, dengan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi aspek utama dalam program ini. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi juga diperlukan untuk memastikan program kerja kelurahan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.



Gambar 1 Kerangka Berpikir